
Analisis Permasalahan Etika Pejabat Pemerintahan Dari Perspektif Administrasi Publik

Fitri Hayani¹ Indah Oktavia² Rindu Oktavia³ Septa Adri Fania⁴ Yulia Hanoselina⁵
Rahmadhona Fitri Helmi⁶

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Jln. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Kota Padang

e-mail : fitrihayani423@gmail.com, oktaviaindah564@gmail.com, rinduoktavia257@gmail.com,
septaadrifania26@gmail.com, yuliahanoselina@fis.unp.ac.id, rahmadhonafh@fis.unp.ac.id

Abstract. *This study analyzes the ethical problems of government officials from the perspective of public administration, which plays an important role in realizing good governance. This study uses a literature study approach by collecting data from journals, books, and relevant documents. The results of the study show that ethical violations, such as abuse of authority, corruption, collusion, and nepotism (CCN), are still frequent at various levels of government. The impact of this violation is a decrease in public trust and the quality of government services. The proposed solutions include strengthening regulations, strict sanctions, bureaucratic reform, and improving ethics education for public officials. This study emphasizes that the application of ethics in public administration is the key to increasing accountability, integrity, and transparency in public services.*

Keywords: *public administration, government ethics, good governance, community service, public service.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis permasalahan etika pejabat pemerintahan dari perspektif administrasi publik, yang berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan mengumpulkan data dari jurnal, buku, dan dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran etika, seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), masih sering terjadi di berbagai tingkat pemerintahan. Dampak dari pelanggaran ini adalah menurunnya kepercayaan publik dan kualitas pelayanan pemerintah. Solusi yang diusulkan mencakup penguatan regulasi, sanksi tegas, reformasi birokrasi, serta peningkatan pendidikan etika bagi pejabat publik. Penelitian ini menekankan bahwa penerapan etika dalam administrasi publik adalah kunci untuk meningkatkan akuntabilitas, integritas, dan transparansi dalam pelayanan publik.

Kata kunci: administrasi publik, etika pemerintahan, good governance, KKN, pelayanan publik

1. LATAR BELAKANG

Etika pejabat pemerintahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Sektor publik di Indonesia juga sektor yang paling kompleks, bukan hanya kinerja pemerintahan saja yang menjadi persoalan namun aparat penegak hukum yang tidak serius dalam menjalankan tugasnya akan menekankan berbagai tindakan menyimpang dari etika pejabat pemerintahan. Logika yang ada bahwa seluruh pejabat publik selalu menjadi pihak yang membela kepentingan publik tapi kenyataannya hanya sebagian yang benar. Pejabat pemerintah yang melaksanakan kebijakan publik diharapkan bertindak sesuai dengan prinsip etika yang meliputi adanya keadilan, integritas, akuntabilitas, dan transparansi. Namun dalam praktiknya permasalahan etika seringkali muncul di berbagai tingkat pemerintahan baik pusat maupun daerah. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, namun juga kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Dari perspektif administrasi publik etika pejabat bahwa persoalan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan prinsip – prinsip dasar administrasi publik seperti efisien, efektivitas, dan kepastian hukum. Administrasi publik berfungsi sebagai landasan untuk mewujudkan kepentingan masyarakat pada umumnya. Pelanggaran etika pejabat pemerintah dapat mengakibatkan disfungsi penyelenggaraan administrasi publik sehingga mempengaruhi proses pengambilan Keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan penyampaian pelayanan publik. Padahal, birokrasi pemerintahan merupakan mesin penggerak Pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, meskipun reformasi birokrasi sangat penting untuk mencapai pembangunan dan pelayanan publik yang baik, namun masih terdapat permasalahan di Indonesia yang menyebabkan kurang optimalnya reformasi birokrasi, seperti pola pikir birokrasi dan etika budaya kerja pejabat pemerintahan. Disadari atau tidak etika pejabat pemerintah komponen penting dalam keberhasilan seluruh agenda pemerintahan termasuk pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) dalam penyelenggaraan pemerintah.

Seiring perubahan yang terjadi dalam masyarakat tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah saat ini sudah banyak yang mengabaikan etika pejabat pemerintah. Pokok permasalahan yang sering berkaitan dengan etika pejabat pemerintahan adalah masih adanya oknum pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Dengan adanya praktik – praktik seperti KKN, pemalsuan dokumen, sentralisasi, pelayanan yang lambat dan berbelit – belit, birokrasi yang lambat. Pungli, bahkan adanya suap sehingga muncul asumsi negative “ kalau bisa di permudah kenapa harus di persulit “. Saat ini seringkali etika menjadi nomor dua dalam pemerintahan. Etika seolah menjadi bagian yang tidak penting dan tidak menarik dalam pemerintahan. Dalam konteks berbagai persoalan penyalahgunaan kekuasaan negara, etika administrasi publik merupakan suatu bentuk pengaturan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan wewenang pejabat pemerintah. Apabila pemerintah ingin sikap, perbuatan dan tindakannya baik, maka fungsi dan kewenangannya harus di landasi etika administrasi publik dalam melaksanakan tugas pokoknya. Etika administrasi publik bagi pejabat pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dan acuan etika administrasi, tetapi juga sebagai standar penentu baik buruknya suatu sikap, Tindakan, dan kebijakan.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang ingin diketahui yaitu :

1. Bagaimana permasalahan etika pejabat pemerintahan dari perspektif administrasi publik ?
2. Bagaimana Solusi permasalahan etika pejabat pemerintahan ?

2. KAJIAN TEORITIS

Etika dalam Administrasi Publik

Etika dalam administrasi publik memainkan peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Etika administratif tidak hanya mengatur perilaku individu yang bekerja dalam lembaga pemerintahan, tetapi juga mengatur interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Menurut Widodo (2001) dalam (Choirulsyah & Azhar, 2024), etika administrasi publik berfungsi sebagai panduan moral untuk memastikan tindakan pejabat publik sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui, seperti kejujuran, integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini memberikan arahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, serta membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan yang melanggar hukum.

Seperti yang dinyatakan oleh Bertens (2001), etika mengacu pada standar moral yang dipegang oleh individu atau kelompok dalam menjalankan tindakan mereka. Di sektor publik, pelanggaran etika seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dapat merusak reputasi lembaga publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Widodo (2001) dalam (Choirulsyah & Azhar, 2024) menekankan bahwa etika dalam administrasi publik tidak hanya menjadi alat untuk mengevaluasi perilaku pejabat publik, tetapi juga sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang baik dan bertanggung jawab.

Good Governance

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik mengacu pada prinsip-prinsip etis yang mendasari proses pemerintahan, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) (1997), *good governance* mencakup penggunaan otoritas politik dan administratif untuk mengelola sumber daya negara secara efektif dan adil, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dan kepercayaan publik. Konsep ini juga mencakup peran pemerintah dalam menjamin hak-hak asasi manusia, mendorong partisipasi warga negara, dan mengawasi distribusi kekuasaan yang adil dalam masyarakat (Keping, 2018).

Dalam konteks administrasi publik, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip *good governance*, seperti penyalahgunaan kekuasaan, dapat mengakibatkan ketidakpercayaan publik (*public distrust*) terhadap lembaga pemerintahan. (Nkyabonaki, 2019) menekankan bahwa menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat mengancam legitimasi lembaga-lembaga pemerintahan dan mempengaruhi efisiensi pelayanan publik. Prinsip-prinsip *good governance* harus diterapkan secara menyeluruh untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Pelanggaran Etika dalam Administrasi Publik

Pelanggaran etika di kalangan pejabat pemerintah sering kali terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, seperti praktik KKN. Hal ini sangat merusak tata kelola pemerintahan dan menghambat upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan (Bisri & Asmoro, 2019). Pelanggaran ini tidak hanya berdampak pada kinerja birokrasi, tetapi juga menurunkan kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat.

Dalam perspektif administrasi publik, pelanggaran etika dapat menghambat efisiensi dan efektivitas birokrasi. Ricocur dalam (Oktari, Mindarti, & Sujarwoto, 2023) menggarisbawahi bahwa pelanggaran etika dalam birokrasi menyebabkan lemahnya integritas pejabat publik, yang berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Solusi untuk mengatasi pelanggaran ini harus mencakup penguatan regulasi dan penerapan sanksi yang tegas bagi para pelanggar.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kajian literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Menurut (Creswell, 2014, p. 40) menyatakan bahwa Kajian literatur adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi literatur. Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur, sebagaimana dijelaskan oleh (Creswell, 2014), di mana data dikumpulkan dari sumber-sumber yang relevan seperti jurnal, buku, dan dokumen terkait permasalahan etika pejabat pemerintah. Data-data ini dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi permasalahan dan solusi yang ditawarkan dalam perspektif administrasi publik. Lokasi penelitian mencakup kajian terhadap sektor publik di Indonesia, terutama pada tingkat pemerintahan pusat dan daerah. Rentang waktu penelitian ini mencakup berbagai studi sebelumnya yang membahas etika pejabat publik dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Hasil Analisis Data

Permasalahan Etika Pejabat Pemerintahan dalam Perspektif Administrasi Publik

Berdasarkan kajian literatur, ditemukan bahwa etika pejabat pemerintahan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam cakupan pemerintahan, pejabat publik memiliki peran yang sangat penting dalam modernisasi dan perkembangan arah pemerintahan sehingga keberadaannya merupakan tombak utama dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat. Pejabat publik berperan sebagai pemimpin dalam organisasi birokrasi, di mana kualitas pelayanan birokrasi sangat dipengaruhi oleh karakter pejabat tersebut. Jika seorang pejabat publik dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara terintegrasi, tepat, dan sesuai dengan peraturan, maka hal ini akan menghasilkan pelayanan birokrasi yang optimal. Pelayanan publik kepada masyarakat dapat dipengaruhi oleh pejabat publik yang terlibat dalam sistem tersebut. Keterlibatan pejabat dalam sistem ini terkadang dapat menimbulkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masalah ini sering kali berakibat pada buruknya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap moral dan etika, serta merupakan tindakan melawan hukum.

Namun dalam praktiknya, banyak pelanggaran etika yang terjadi. Pelanggaran tersebut meliputi penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta rendahnya tingkat akuntabilitas dan transparansi di berbagai tingkat pemerintahan (Bisri & Asmoro, 2019) dan Selain itu, pegawai pemerintah melakukan pungutan liar (pungli) dengan meminta biaya di luar ketentuan peraturan yang berlaku. Hal ini menyebabkan proses pelayanan publik yang seharusnya terjangkau menjadi terlihat sangat mahal karena adanya biaya tambahan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Praktik KKN di lingkungan pemerintahan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan, dengan mayoritas institusi publik terlibat dalam tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat. Tidak hanya terjadi di pemerintahan pusat, namun juga telah meluas hingga ke institusi pemerintahan di tingkat yang paling rendah, seperti kelurahan dan desa.

Laporan hasil pemantauan tren penindakan korupsi tahun 2022 (ICW), korupsi seperti penyakit kronis yang sulit disembuhkan. Jumlah kasus korupsi dari tahun ke tahun terus meningkat. Poin Indeks Perspesi Korupsi (2022) Indonesia anjlok dari 38 menjadi 34 poin serta menduduki peringkat 110 dari 180 negara. ICW mendata dari tahun 2020, 2021, 2022 sudah banyak kasus korupsi dan jumlah tersangka. Pada tahun 2020 jumlah kasus 444 dan jumlah tersangka 875, tahun 2021 ada 533 jumlah kasus dan jumlah tersangka 1.173, serta tahun 2022

terdapat 579 jumlah kasus dan 1.396 jumlah tersangka. Oleh karena itu, korupsi mengalami peningkatan dari segi jumlah kasus maupun jumlah tersangka.

Pelanggaran etika pemerintahan tidak hanya di pemerintah pusat melainkan juga di pemerintahan daerah seperti di desa. Sejak diterbitkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ICW mencatat adanya kenaikan yang cukup konsisten terhadap kasus korupsi yang terjadi di Desa. Tahun 2020 jumlah kasus 129 dan jumlah tersangka 172, tahun 2021 jumlah kasus 154 dan jumlah tersangka 245, tahun 2022 jumlah kasus 155 dan jumlah tersangka 252.

Pelanggaran etika ini memiliki dampak besar terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Fenomena ini dikenal dengan istilah public distrust, yang menurut (Nkyabonaki, 2019), mengancam legitimasi pemerintah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik. Pada tahap ini, muncul pola pikir bahwa pejabat publik hanya berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok, dan bukan kepentingan masyarakat umum.

Keterkaitan Hasil dan Konsep Dasar

Dalam perspektif administrasi publik, pelanggaran etika sangat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas birokrasi. Etika dalam administrasi publik berperan sebagai pedoman bagi para pejabat untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip seperti keadilan, integritas, dan akuntabilitas (Ricocur dalam (Oktari, Mindarti , & Sujarwoto, 2023)). Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini tidak hanya berdampak pada kinerja pemerintahan, tetapi juga pada kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat.

Tindakan korupsi atau suap yang dilakukan oleh pejabat publik akan menghambat proses pengambilan keputusan yang seharusnya adil dan transparan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mériade, 2018), yang menunjukkan bahwa etika berfungsi sebagai landasan moral yang mempengaruhi perilaku dan sikap pejabat publik dalam menjalankan tugasnya. Sebagai contoh korupsi pada rabu Oktober 2023, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menetapkan Syahrul Yasin Limpo, mantan menteri pertanian sebagai tersangka atas dugaan melakukan pemerasan dan penerimaan gratifikasidi Kementerian Pertanian. Menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo dan dua staf bawahanya, Direktur alat mesin pertanian Muhammad Hatta dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono. Mereka di duga melakukan tindak korupsi, suap, dan pemerasan (Riani sanusi, 2023).

Solusi dan Implikasi Teoritis

Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah penguatan regulasi dan sanksi yang tegas bagi pelanggar etika. Selain itu, perlu adanya reformasi birokrasi yang menitikberatkan pada penguatan nilai-nilai etika dalam setiap aspek pelayanan publik (Kridawati, 2010) dalam (Oktari, Mindarti , & Sujarwoto, 2023). Reformasi ini harus didukung dengan pendidikan dan

pelatihan etika bagi pejabat publik, serta peningkatan pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Salah satu cara untuk mengatasi masalah etika di kalangan pejabat pemerintah adalah dengan memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat Jenderal, dan Ombudsman harus diberi lebih banyak wewenang serta sumber daya yang cukup. Tindakan penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran etika dapat berfungsi sebagai pencegahan yang efektif. Selain itu solusinya dengan menanamkan pentingnya etika pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintah.

Permasalahan etika pejabat publik seperti penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat pemerintahan, pelayanan publik yang kurang optimal, serta rendahnya transparansi dalam sistem integritas publik. Selain itu, melemahnya nilai-nilai sosial mengakibatkan kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan umum. Banyaknya praktik permasalahan etika yang dilakukan oleh birokrasi dengan mengatasnamakan kebijakan publik juga menjadi masalah. Oleh karena itu, penguatan hukum administrasi negara menjadi penting sebagai salah satu langkah efektif untuk mencegah terjadinya permasalahan etika pejabat pemerintahan. Penguatan Hukum Administrasi Negara (HAN) sebagai upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan mengoptimalkan kembali kepemimpinan pemerintahan, memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperkuat aspek hukum dalam penegakan hukum, meningkatkan integritas dan sinergi antara birokrasi dan aparat penegak hukum, serta membangun kembali kesadaran masyarakat dalam memberantas korupsi.

Implikasi teoritis dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan etika dalam administrasi publik bukan hanya sebagai alat pengendali perilaku, tetapi juga sebagai penentu keberhasilan tata kelola pemerintahan yang efektif. Dengan kata lain, semakin kuat penerapan etika, semakin kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan semakin tinggi kualitas pelayanan publik. Permasalahan etika pejabat pemerintahan memunculkan implikasi menurunnya kepercayaan publik kepada pemerintah dan menghambat pembangunan. Hal ini dikarenakan perubahan pola perilaku serta gaya hidup para pejabat publik yang semakin tidak transparan dan materialistis.

Kesesuaian dengan Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menegaskan pentingnya etika dalam birokrasi pemerintahan. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh (Bisri & Asmoro, 2019) menunjukkan bahwa pelanggaran etika pada pejabat pemerintah dapat

menyebabkan disfungsi dalam pelaksanaan administrasi publik, yang pada gilirannya menurunkan efisiensi pelayanan publik.

Namun, beberapa hasil penelitian juga menunjukkan adanya tantangan besar dalam implementasi etika ini. Salah satu tantangan tersebut adalah budaya birokrasi yang cenderung permisif terhadap pelanggaran etika, di mana tindakan seperti korupsi dianggap sebagai hal yang wajar atau "normal" dalam proses pengambilan keputusan di beberapa instansi pemerintah.

Implikasi Terapan

Secara terapan, salah satu faktor utama yang berkontribusi dalam pelanggaran etika pejabat pemerintahan adalah lemahnya penerapan prinsip etika dalam administrasi publik. Untuk mengatasi hal ini, perlu segera dilakukan langkah-langkah nyata seperti memperkuat transparansi, meningkatkan integritas birokrasi, dan menegakkan akuntabilitas di kalangan pejabat publik. Selain itu, pelatihan khusus tentang standar etika bagi pejabat pemerintahan sangat diperlukan untuk mencegah praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan gratifikasi yang dapat merusak sistem pelayanan publik. Penelitian ini menyarankan perlunya perubahan budaya kerja dalam birokrasi Indonesia, terutama dalam hal penerapan etika. Penguatan etika administrasi tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada komitmen moral dari setiap pejabat publik untuk menjalankan tugasnya dengan integritas. Melalui penerapan standar etika yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih kuat, diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan efektif. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat juga diperlukan untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan partisipatif. Dengan demikian, penerapan etika akan membantu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari KKN.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Etika pejabat pemerintahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Dari perspektif administrasi publik etika pejabat bahwa persoalan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan prinsip – prinsip dasar administrasi publik seperti efisien, efektivitas, dan kepastian hukum. Pelanggaran etika di kalangan pejabat pemerintah sering kali terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, seperti praktik KKN. Selain itu, pegawai pemerintah melakukan pungutan liar (pungli) dengan meminta biaya di luar ketentuan peraturan yang berlaku. Hal ini menyebabkan proses pelayanan publik yang seharusnya terjangkau menjadi

terlihat sangat mahal karena adanya biaya tambahan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun saran penulis mengenai permasalahan etika pejabat pemerintahan dari perspektif administrasi publik yaitu :

1. Untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik, perlu diterapkan sanksi yang tegas terhadap pejabat yang melanggar aturan etika. Penerapan sanksi ini harus dilakukan secara adil, tanpa diskriminasi, serta dilaksanakan dengan transparansi penuh, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi publik. Konsistensi dalam penegakan sanksi akan memberikan efek jera dan pada saat yang sama memperkuat akuntabilitas pejabat dalam menjalankan tugas mereka di sektor pemerintahan.
2. Masyarakat harus secara aktif dilibatkan dalam pengawasan terhadap pejabat pemerintahan. Penyediaan platform pengaduan yang mudah diakses oleh publik akan memberi masyarakat ruang untuk berperan dalam menjaga integritas pemerintahan. Dengan adanya partisipasi publik, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Partisipasi masyarakat akan memperkuat kontrol sosial terhadap kinerja pejabat serta mendorong adanya perubahan positif dalam sistem pemerintahan.

DAFTAR REFERENSI

- Baru, B. M., & Rusbiyanti, S. (2020, October). BUDAYA BIRORASI PUBLIK, DAN POTENSI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN). In Seminar Nasional Sistem Informasi (SENASIF) (Vol. 4, pp. 2345-2358).
- Budiawan, A., & Sunarti, N. (2021). ANALISIS ETIKA PEJABAT BIROKRASI INDONESIA: Array. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 725-745.
- Cahyani, M. G., & Ramadhani, R. (2023). Analisis Peran Hukum Administrasi Negara Terhadap Upaya Pencegahan Praktik Korupsi Dalam Pemerintahan. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 2(1), 12-22.
- Dewi, R. C., & Suparno, S. (2022). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78-90.
- Djamil, M. N., & Djafar, T. M. (2016). Etika Publik Pejabat Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih. *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, 12(01), 1775-1760.
- Khotami, R. S., & Saputra, M. R. (2024). Pemahaman Hadis Al-Ghazali Tentang Menasihati Pemimpin: Studi Kasus Pejabat Negara di Indonesia. *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, 5(3), 202-216.

- Koenti, I. J., Ethika, T. D. D., & Suprihandoko, R. (2022, December). Aktualisasi Pancasila dalam Etika Penyelenggara Negara untuk Mewujudkan Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. In *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum* (pp. 221-233).
- Nugroho, I. (2013). Mengembangkan etika kepemimpinan: Fenomena pada jabatan publik. *Diskusi Bulanan Malang Corruption Watch (MCW)*. Universitas Widyagama Malang, 20.
- Oktari, Y. (2023). Urgensi Etika Pejabat Publik dan Peranan Generasi Z dalam Studi Administrasi Publik. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 9(1), 11-20.
- Prabowo, I. D., & Hermawati, I. (2024). ETIKA PEMERINTAHAN: MENJAGA INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN. *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis*, 2(7), 592-597.
- Sugiantari, A. A. P. W. (2017). Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Penggunaan Wewenang oleh Pejabat Publik. *Jurnal Advokasi*, 7(1).
- Trisakti, F., Muljawan, A. R., Muthmainah, A., & Wahdiani, D. (2023). Pentingnya Etika dan Akuntabilitas di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(1), 22-31.
- Widiaswari, R. R. (2022). Etika Administrasi Publik Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(2), 600-608.
- Yudhyarta, D. Y. (2020). Pemberdayaan etika pancasila dalam konteks kehidupan kampus. *AL-LIQQO: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(01), 43-63.
- Yudianto, E., Syamsya, M., Mustofa, A., Fian, S., & Nasution, H. (2024). Urgensi Etika Administrasi Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pelayanan Publik. *Jurnal Niara*, 17(1), 162-170.